

ABSTRAK

Integrasi pendidikan kesehatan masyarakat (PKM) dalam kurikulum pendidikan dokter menjadi salah satu strategi penting untuk mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki kemampuan promotif, preventif, dan kepedulian sosial terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesesuaian kurikulum, proses implementasi, dan keterlibatan dosen di berbagai institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan komponen kurikulum yang mendasari integrasi PKM, mengidentifikasi proses implementasi serta faktor pendukung dan penghambatnya, mengevaluasi persepsi pengelola dan dosen terhadap efektivitas integrasi PKM, serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kualitas lulusan dokter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi administrasi dan implementasi kebijakan. Informan terdiri atas 14 orang, meliputi 10 dosen klinis (5 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan 5 dari Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia) serta 4 informan mahasiswa dan alumni dari kedua institusi tersebut. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen kurikulum, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan integrasi PKM telah diterapkan di kedua fakultas dengan mengacu pada SKDI 2019, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, dan pedoman KKI. USU melaksanakan integrasi secara terstruktur melalui kegiatan *Community-Based Education*, sedangkan UNPRI menerapkannya melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pembelajaran tematik. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, peran aktif dosen, dan dukungan instansi kesehatan, sementara hambatan utamanya adalah keterbatasan waktu, sarana, serta jumlah dosen berlatar belakang kesehatan masyarakat. Dosen menilai bahwa integrasi PKM mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial mahasiswa, sedangkan alumni merasa pengalaman berbasis komunitas membantu mereka beradaptasi di dunia kerja. Secara keseluruhan, kebijakan integrasi PKM telah berjalan baik di kedua fakultas dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi lulusan dokter dalam bidang promotif, preventif, dan sosial kemasyarakatan. Fakultas diharapkan terus memperkuat pelaksanaan PKM melalui pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan evaluasi berkelanjutan, sedangkan pemerintah dan KKI diharapkan memberikan dukungan kebijakan yang konsisten. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian ke fakultas kedokteran lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh di tingkat nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Kurikulum Kedokteran, Implementasi, Kompetensi Lulusan Dokter